

## **RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)**

Sekolah : **SMA Negeri 1 Ulu Moro'o**  
Kelas/Semester : X/1  
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)  
Materi Pokok : Menganalisis nilai-Nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara  
Alokasi Waktu : 4 X Pertemuan

### **A. Kompetensi Inti**

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

### **B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi**

<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Indikator Pencapaian Kompetensi</b>
1.1. Mengorganisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1.1. Membangun nilai-nilai Toleran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara 1.1.2. Membangun nilai-nilai Kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
2.1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah Negara	2.1.1. Membangun nilai-nilai Toleransi dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah Negara 2.1.2. Membangun nilai-nilai Kejujuran dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah Negara
3.1. Menganalisis nilai-Nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	3.1.1. Menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia 3.1.2. Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
	<p>Indonesia dan lembaga pemerintahan non departemen</p> <p>3.1.3. Menganalisis kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI</p> <p>3.1.4. Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan</p>
<p>4.1. Mengambil keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p>	<p>4.1.1 Menyaji hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara .</p> <p>4.1.2 Mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p>

### C. Materi Pembelajaran

Materi pelajaran PPKn Bab 1 adalah **Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara**, dengan Sub-Bab sebagai berikut.

1. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara
2. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Departemen
3. Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Kerangka NKRI
4. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan

### D. Proses Pembelajaran

#### 1. Pertemuan Pertama

Pertemuan pertama materi Bab 1 merupakan wahana dialog untuk lebih memantapkan proses pembelajaran PPKn yang akan dilakukan. Pertemuan ini juga menjadi wahana untuk membangun ikatan emosional antara guru dan peserta didik, di samping untuk menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan dibahas. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

##### a. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik dapat:

- 1) Membangun nilai-nilai Toleran dan Kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
- 2) Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan

- 3) Menyaji hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara .
- 4) Mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

**b. Kegiatan pembelajaran**

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan Model Pembelajaran ***Problem Based Learning*** sebagai berikut :

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
<p><b>Orientasi peserta didik pada masalah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan.</li> <li>2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan sara syukur peserta didik masih dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah (SMA)</li> <li>3. Guru menegaskan kembali tentang topik dan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan</li> <li>4. Guru meminta peserta didik untuk mengamati Gambar 1.1. tentang Photo Presiden dengan Para Menteri di Istana Negara serta membaca buku Bab 1. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara, dengan Sub Bab A. Pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia.</li> </ol> <div data-bbox="635 1301 1409 1733" data-label="Image"> </div> <p>Sumber : <a href="https://www.google.co.id/merdeka.com">https://www.google.co.id/merdeka.com</a> Gambar 1.1. Photo Presiden dan Para Menteri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Guru meminta peserta didik untuk menganalisis suatu permasalahan terkait dengan Pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia.</li> <li>6. Guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yang penting dan mungkin dapat dieksplorasi pada saat proses menganalisis nanti</li> </ol>

<b>SINTAK</b>	<b>DESKRIPSI KEGIATAN</b>
<p><b>Mengorganisasi peserta didik untuk belajar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru membagi peserta didik dalam 7 kelompok yang beranggotakan 4 - 5 orang siswa. Dengan pembagian tugas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kelompok 1 dan 2 Analisis tentang Kekuasaan Konstitutif</li> <li>❖ Kelompok 3 dan 4 Analisis tentang kekuasaan Legislatif</li> <li>❖ Kelompok 5 dan 6 Analisis tentang kekuasaan Yudikatif</li> <li>❖ Kelompok 7 Analisis tentang kekuasaan Kekuasaan Eksaminatif</li> </ul> </li> <li>2. Guru meminta peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui, dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan secara mendalam dalam daftar pertanyaan, terkait dengan tugas yang diberikan</li> <li>3. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan.</li> <li>4. Selama penyelidikan, peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tugas diberikan dengan indikator sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tugas dan wewenang lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</li> <li>b. Hubungan kerja dengan lembaga Negara lainnya</li> <li>c. Permasalahan dihadapi lembaga Negara tersebut</li> <li>d. Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi</li> </ol> </li> <li>5. Guru bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu, namun peserta didik harus berusaha untuk belajar keras.</li> </ol>
<p><b>Membimbing penyelidikan individual dan kelompok</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru membantu dan membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi tentang Tugas yang diberikan sesuai dengan penugasannya yaitu meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tugas dan wewenang lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</li> <li>b. Hubungan kerja dengan lembaga Negara lainnya</li> <li>c. Permasalahan dihadapi lembaga Negara tersebut</li> <li>d. Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi</li> </ol> </li> <li>2. Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan pada peserta didik lain dalam kelompok untuk berpikir tentang jawaban terhadap pemecahan masalah terhadap kendala-</li> </ol>

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
	<p>kendala yang dihadapi lembaga Negara tersebut</p> <p>3. Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi peserta didik dengan membebi konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau mengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah mereka lakukan.</p>
<p><b>Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</b></p>	<p>1. Guru membimbing peserta didik dalam kelompok untuk menyusun laporan hasil kajian kelompok</p> <p>2. Laporan tersebut dapat berupa bahan tayang (powerpoint) atau laporan tertulis.</p> <p>3. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah di kelas. Kegiatan penyajian dapat dilakukan setiap kelompok secara bergantian di depan kelas dan kelompok lain memberikan pertanyaan atau komentar terhadap hasil kerja dari kelompok penyaji.</p>
<p><b>Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</b></p>	<p>1. Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama proses kegiatan pengumpulan informasi, proses analisis serta preses berlangsungnya tugas kelompok</p> <p>2. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang telah mereka lakukan.</p> <p>3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar</p>

### c. Penilaian

1. Penilaian Sikap  
Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan dengan observasi selama proses pembelajaran berlangsung. (*Panduan Observasi Terlampir*)
2. Penilaian Pengetahuan  
Penilaian pengetahuan dilakukan dengan mengumpulkan hasil kerja Kelompok sebagaimana tersebut dalam kegiatan pembelajaran *problem based learning* diatas
3. Penilaian Keterampilan  
Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan hasil kerja kelompok yang dibuat baik secara lisan (1 s/d 2 orang yang merupakan perwakilan kelompok) maupun secara tertulis (selain peserta didik yang mengkomuniikasikan).

## 2. Pertemuan Kedua

### a. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik dapat:

- 1) Membangun nilai-nilai Toleran dan Kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara

- 2) Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non departemen
- 3) Menyaji hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara .
- 4) Mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

**b. Kegiatan Pembelajaran**

Secara umum kegiatan pembelajaran dibagi tiga tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

<b>Deskripsi Kegiatan</b>
<p><b>Pendahuluan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi</li> <li>2. Guru menyampaikan topik tentang “Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen”.</li> <li>3. Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui metode diskusi. Kelompok yang telah ditentukan topiknya pada pertemuan pertama (kelompok 1 agar mempersiapkan kelompoknya).</li> </ol>
<p><b>Kegiatan Inti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentasi Kelompok 1, topik Bab 1, Sub-Bab B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen.</li> <li>2. Pada saat Kelompok 1 tampil presentasi, kelompok lainnya menyimak materi presentasi (mengamati).</li> <li>3. Setelah presentasi selesai dipaparkan oleh Kelompok 1, kelompok lain memberikan saran/masukan dan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dibahas (menanya).</li> <li>4. Pengajuan pertanyaan dilakukan dalam bentuk termin pertanyaan (jumlah termin disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia).</li> </ol> <p>Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan sebelum presentasi kelompok dalam bentuk penugasan mencari informasi terkait dengan materi yang akan di presentasikan.</p> <p>Kegiatan mengasosiasikan dilakukan baik oleh kelompok yang mendapat tugas presentasi, juga kelompok lain dengan melakukan analisis dalam kelompok pada saat menyimak jalannya presentasi guna membuat pertanyaan.</p>
<p><b>Penutup</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru menyimpulkan materi dan jalannya diskusi.</li> <li>2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kasus tersebut.</li> <li>3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</li> </ol>

### c. Penilaian

#### 1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.

#### 2. Penilaian pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada Latihan Tugas Mandiri 1.2. dan Tugas Mandiri 1.3. serta Tugas Kelompok 1.2.

Coba kalian cari informasi dari buku sejarah atau internet mengenai nama-nama kabinet dari mulai presiden pertama sampai dengan presiden saat ini. Tulislah informasi yang kalian temukan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2. Presiden dan Nama Kabinet,

Presiden Ke-	Nama Presiden	Nama Kabinet

Tabel 1.3. Pengelompokan Kementerian

No	Lingkup Tugas	Nama Kementerian
1	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	
2	Bidang Perekonomian	
3	Bidang Kesejahteraan rakyat	

*Tugas Kelompok 1.2. Tugas dan fungsi lembaga pemerintahan non kementerian*

Bacalah secara berkelompok buku sumber dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Kemudian identifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga yang disebutkan di atas. Tulislah hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.2.  
Tugas dan fungsi lembaga pemerintahan non kementerian

No	Nama Lembaga Pemerintah	Tugas dan Fungsi
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengkomunikasikan secara lisan).

### 3. Pertemuan Ketiga

#### a. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik dapat:

- 1) Membangun nilai-nilai Toleran dan Kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
- 2) Menganalisis kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI
- 3) Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 4) Menyaji hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara .
- 5) Mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

#### b. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini membagi kegiatan pembelajaran dibagi tiga tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Deskripsi Kegiatan
--------------------



## Deskripsi Kegiatan

### Pendahuluan

1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi dan tak kalah penting aspek sikap spiritual peserta didik.
2. Guru menyampaikan topik tentang “Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
3. Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui model problem based learning

### Kegiatan Inti

1. Sebelum peserta didik memahami Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, guru dapat menjelaskan bagaimana Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik.
2. Guru memaparkan secara singkat tentang Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik
3. Peserta didik diberi waktu untuk membaca buku Teks Pelajaran PPKn kelas X atau sumber lain (seperti website/internet/media cetak/sumber lainnya) tentang Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik  
  
(dalam kegiatan ini sudah terintegrasi dengan kegiatan mengamati dan kegiatan menanya antarsesama peserta didik).
4. Peserta didik diberi waktu untuk menganalisis Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik yang terdapat dalam buku Teks Pelajaran PPKn Kelas X (Sub-bab C dengan membandingkan dari sumber lain yang relevan (misalnya website/internet/sumber lainnya).
5. Peserta didik melakukan analisis Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik
6. Secara random (1 s/d 2 orang) peserta didik dapat mengkomunikasikan secara lisan hasil analisis Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik. Sedangkan peserta didik yang lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis.

### Penutup

1. Guru menyimpulkan hasil pemaparan Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik dilanjutkan dengan umpan balik secara lisan kepada peserta didik tentang landasan hukum Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik
2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik.

### Deskripsi Kegiatan

3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

### c. Penilaian

#### 1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung, serta aspek kerja sama kelompok.

#### 2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk melengkapi dan menjawab pertanyaan yang terdapat pada Tugas Mandiri 1.4. Asas Otonomi Daerah, Dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan dikenal beberapa asas lainnya, diantaranya sentralisasi, desentralisasi dan dekonsentrasi. Nah berkaitan dengan hal itu, coba kalian cari pengertian ketiga asas tersebut dari buku sumber yang lain atau internet. Tuliskanlah pengertian ketiga asas tersebut dalam tabel di bawah ini. Informasikanlah kepada teman yang lain.

Tabel 1.4. Tugas Mandiri Asas Otonomi Daerah

No	Nama Azas	Pengertian
1	Sentralisasi	
2	Desentralisasi	
3	Dekonsentrasi	

Tugas Kelompok 1.3. Observasi terhadap kualitas pelaksanaan kewenangan pemerintahan di daerah kabupaten/kota

Kerjakanlah tugas ini dengan teman sebangku. Lakukanlah pengamatan baik secara langsung atau tidak langsung (dari buku sumber, media cetak atau media elektronik) terhadap kualitas pelaksanaan kewenangan pemerintahan di daerah kabupaten/kota kalian. Bubuhkanlah tanda ceklis (√) pada kolom baik, kurang atau buruk sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya serta tuliskanlah indikatornya

Tabel 1.3. Tugas Kelompok Observasi terhadap kualitas pelaksanaan kewenangan pemerintahan di daerah kabupaten/kota

No	Kewenangan	Kualitas			Indikator
		Baik	Kurang	Buruk	
1	Perencanaan dan pengendalian pembangunan.	√			Pembangunan tidak hanya difokuskan pada satu daerah saja, tetapi semua daerah.
2	Perencanaan, pemanfaatan, dan				

No	Kewenangan	Kualitas			Indikator
		Baik	Kurang	Buruk	
	pengawasan tata ruang .				
3	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.				
4	Penyediaan sarana dan prasarana umum.				
5	Penanganan bidang kesehatan.				
6	Penyelenggaraan pendidikan.				
7	Penanggulangan masalah sosial.				
8	Pelayanan bidang ketenagakerjaan.				
9	Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.				
10	Pengendalian lingkungan hidup.				
11	Pelayanan pertanahan.				
12	Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.				
13	Pelayanan administrasi umum pemerintahan.				
14	Pelayanan administrasi penanaman modal.				

### 3. Penilaian Keterampilan

Penilaian ini dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan hasil analisis Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik (1 s/d 2 orang, perwakilan kelompok) maupun secara tertulis (selain 1 s/d 2 orang yang merupakan perwakilan kelompok diatas)

## 4. Pertemuan Keempat

### a. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik dapat:

- 1) Membangun nilai-nilai Toleran dan Kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
- 2) Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 3) Menyaji hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara .

- 4) Mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

**b. Kegiatan Pembelajaran**

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan Model Pembelajaran ***Problem Based Learning***, sebagai berikut :

<b>SINTAK</b>	<b>DESKRIPSI KEGIATAN</b>
<b>Orientasi peserta didik pada masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi peserta didik agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih.</li> <li>2. Guru meminta peserta didik untuk mengamati dengan membaca buku BAB 1, Sub Bab D. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>3. Guru menanamkan sikap teliti dan cermat dalam membaca sub bab tersebut.</li> <li>4. Guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yang penting dan mungkin dapat dieksplorasi dari bacaan tersebut.</li> </ol>
<b>Mengorganisasi peserta didik untuk belajar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru membagi peserta didik dalam 7 kelompok heterogen beranggotakan 4 - 5 orang.</li> <li>2. Guru meminta peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui, dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan secara mendalam dalam daftar pertanyaan.</li> <li>3. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan.</li> <li>4. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak “benar” sebuah masalah yang rumit dan kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan.</li> <li>5. Selama penyelidikan peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi tentang penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.</li> <li>6. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu, namun peserta didik harus berusaha untuk belajar keras.</li> <li>7. Peserta didik aktif terlibat dalam sejumlah kegiatan penyelidikan dan hasil-hasil penyelidikan ini dapat menghasilkan penyelesaian masalah tersebut.</li> </ol>
<b>Membimbing penyelidikan individual dan kelompok</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi tentang penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif), ditinjau dari;             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai Ketuhanan</li> <li>b. Nilai Kemanusiaan</li> <li>c. Nilai Persatuan</li> </ol> </li> </ol>

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
	<p>d. Nilai Kerakyatan, dan e. Nilai Keadilan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan pada peserta didik untuk berpikir tentang jawaban terhadap masalah tersebut diatas dan pemecahan masalah jika Nilai-nilai tersebut belum diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan RI.</li> <li>3. Guru membimbingpeserta didik untuk mencari informasi dan menyelidiki penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh kelompok.</li> <li>4. Guru menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks atau buku referensi lainnya.</li> <li>5. Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi peserta didik dengan membei konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau mengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah mereka lakukan.</li> </ol>
<p><b>Mengembang kan dan menyajikan hasil karya</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Guru membimbing kelompok untuk mengidentifikasi Nilai-nilai Pancasila yang sudah di implementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan upaya pemecahan masalah jika Nilai-nilai tersebut belum diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan RI</li> <li>5. Guru membimbing peserta didik menyusun laporan hasil identifikasi penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laporan tersebut dapat berupa bahan tayang (powerpoint) atau laporan tertulis.</li> <li>6. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah di kelas. Kegiatan penyajian dapat dilakukan setiap kelompok secara bergantian di depan kelas dan kelompok lain memberikan pertanyaan atau komentar terhadap hasil kerja dari kelompok penyaji.</li> </ol>
<p><b>Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru memberikan bimbingan agar peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi Nilai-nilai Pancasila manakah yang telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan upaya pemecahan masalah jika Nilai-nilai tersebut belum diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan RI</li> <li>2. Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama proses kegiatan belajarnya.</li> <li>3. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan.</li> </ol>

#### **Penilaian**

1. Penilaian Sikap  
Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan dengan Penilaian diri dan Penilaian antar teman.
2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan mengumpulkan hasil kerja Kelompok sebagaimana tersebut dalam kegiatan pembelajaran *problems based learning* diatas

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan hasil kerja kelompok yang dibuat baik secara lisan (1 s/d 2 orang yang merupakan perwakilan kelompok) maupun secara tertulis (selain peserta didik yang mengkomuniikasikan).

Mengetahui :  
Kepala Sekolah,

Ulu Moro'o, Juli 2017

Guru Mata Pelajaran

**SUCIATI TELAUMBANUA, S.Pd**  
NIP. 19810823200611 2 001

**NO'ITOLO GULO, S.Pd**  
NIP. 19851210201209 1 001



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran Rubrik Penilaian

#### 1. Lembar Panduan Observasi

##### *Petunjuk*

- ✓ Lembar observasi ini diisi oleh guru pada saat pelaksanaan pembelajaran.
- ✓ Observasi terhadap peserta didik dilaksanakan selama 1 (satu) semester

No	Tanggal	Nama Siswa	Catatan Perilaku	Butir Sikap
1				
2				
3				
4	....	....		

#### 2. Lembar Penilaian Diskusi

##### *Petunjuk*

Lembar ini diisi oleh guru pada saat diskusi kelompok. Lembar ini mencatat keefektifan peserta diskusi dalam 4 (empat) kode nilai akhir, yaitu: A (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), dan K (Kurang). Pada kolom Aspek Penilaian yang terdiri dari sikap, pendapat dan bahasa, tuliskan skor angka 0 - 100. Pada kolom Penilaian, tuliskan Rata-Rata Skor. Angkakan konversi Kode Nilainya.

No	Nama Peserta didik	Aspek Penilaian			Penilaian	
		Sikap	Pendapat	Bahasa	Rata-rata Skor Angka	Kode Nilai

##### **Keterangan:**

1. Sikap : kesopanan, kerja sama, semangat, toleransi meluruskan penyimpangan, dan menunjukkan sikap terpuji
2. Pendapat : rasional, teliti, jelas, relevan, sistematis dan keaktifan pendapat
3. Bahasa : jelas, teliti, tepat, menarik dan wajar

Peserta didik memperoleh nilai :

Interval	Nilai Kualitatif
81 – 100	A (Sangat Baik)
70 – 80	B (Baik)
50 – 69	C (Cukup)
< 60	K (Kurang)

### 3. Lembar Kinerja Presentasi

**Materi** : .....

**Kelompok** : .....

No	Nama Peserta didik	Kinerja Presentasi				Jml Skor	Nilai
		Kreatifitas	Kebenaran substansi	Penyajian materi	Visual/grafis		
1							
2							
3							
4							
...							

Keterangan pengisian skor

Interval	Nilai Kualitatif
81 – 100	A (Sangat Baik)
61 – 80	B (Baik)
50 – 60	C (Cukup)
< 60	K (Kurang)

Keterangan:

NO	INDIKATOR	URAIAN
1	Kreativitas	Baru, unik, tidak asal berbeda
2	Kebenaran substansi materi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sesuai dengan konsep dan teori yang benar dari sisi keilmuan</li> <li>▪ Tidak ada bagian yang salah/keliru</li> <li>▪ Tidak ada kesalahan penempatan gambar, suara dan teks</li> </ul>
3	Penyajian Materi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Runtut sesuai dengan struktur keilmuan</li> <li>▪ Mengikuti alur logika yang jelas ( sistematis )</li> <li>▪ Bervariasi</li> </ul>



<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>URAIAN</b>
4	Grafis	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tampilan layar ( warna, tata letak (layout))</li><li>▪ Ilustrasi</li></ul>



## Lampiran Uji Kompetensi

### KOMPETENSI BAB 1

#### A. Uraian

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Pada hakikatnya kekuasaan negara menurut Teori Trias menurut Montesquie terdiri atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Berdsarkan hal tersebut Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia !
2. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan Negara. Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 !
3. Pada dasarnya selain memiliki kementerian negara, pemerintah Republik Indonesia memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang dahulu dikenal dengan istilah lembaga pemerintahan non departemen. Jelaskan dan berikan contoh Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Republik Indonesia !
4. Pada hakikatnya Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebutkan 3 (tiga) tugas kementerian negara dalam menyelenggarakan pemerintahan negara !
5. Pada hakikatnya keberadaan pemerintah daerah menunjang pemerintah pusat dalam menjalankan efektifitas dan efisiensi pemerintahan Negara. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia !

#### B. Kunci Jawaban

No	Jawaban	Skor
1	Jenis kekuasaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia, yaitu: a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.	3
2	Karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: 1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggraan pemerintahan Negara.	6

No	Jawaban	Skor
	<p>Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.</p> <p>3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.</p> <p>4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggara rakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.</p> <p>5) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.</p> <p>6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.</p>	
3	<p>Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun</p>	3

No	Jawaban	Skor
	<p>2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen</p> <p>Contoh Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Intelijen Negara (BIN)</li> <li>b. Badan Narkotika Nasional (BNN)</li> <li>c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)</li> <li>d. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)</li> <li>e. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)</li> <li>f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)</li> <li>g. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)</li> <li>h. Badan Pertanahan Nasional (BPN)</li> <li>i. Badan Pusat Statistik(BPS)</li> <li>j. Badan SAR Nasional (Basarnas)</li> <li>k. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)</li> <li>l. Dan lain-lain</li> </ol>	
4	<p>3 (tiga) tugas kementerian negara dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.</li> <li>2) Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.</li> <li>3) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinnkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.</li> </ol>	3
5	<p>keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia sangat penting karena secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan</p>	3

No	Jawaban	Skor
	<p>kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa di negara</p> <p>kita terdapat mekanisme pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.</p> <p>Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bukanlah lembaga yang terpisah atau berdiri sendiri tanpa adanya kontrol dan koordinasi. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan pelaku pembagian kekuasaan secara vertikal. Dengan kata lain hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah itu bersifat hierarkis. Begitu pula hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota juga bersifat hierarkis.</p>	
<b>SKOR TOTAL</b>		<b>18</b>

### C. Penilaian Soal Uraian

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{18} \times 100$$